



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUCHAMAD TAUFIQ TRISNAJAYA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 199323

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 370.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.500.000

1. MOBIL, AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.500.000
2. MOTOR, MIO M3 SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 65.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 574.500.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 574.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HALIM PARNOMO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 64027

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	591.300.000
1. Bangunan Seluas 80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
2. Tanah Seluas 181 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 416.300.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	44.500.000
1. MOTOR, TVS RTR SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOTOR, TVS DAZZ SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
3. MOBIL, KIA CARNIVAL GS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	26.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	28.366.652
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	690.566.652
III. HUTANG	Rp.	365.225.791



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

325.340.861

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : TITA PUJI LESTARI
- Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
- NHK : 73061

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.420.000.000
1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 35.000.000		
2. Tanah Seluas 1366 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 517 m2/330 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	103.000.000
1. MOBIL, AVANZA AV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
2. MOTOR, VARIO VARIO 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.500.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	226.045.009
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.758.545.009
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.758.545.009

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INAIYAH
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 639804

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	15.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	116.574.473
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	140.574.473
III. HUTANG	Rp.	22.917.865
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	117.656.608

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.